

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH PENERIMA BANTUAN**

**(Studi Kasus di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat,
Kabupaten Lampung Utara)**

(Skripsi)

Oleh:

Ferdian Yusuf
2216041045



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS RUMAH PENERIMA BANTUAN

**(Studi Kasus di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten
Lampung Utara)**

Oleh

FERDIAN YUSUF

Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Lampung Utara dengan persentase penduduk miskin sebesar 16,92% pada tahun 2024, yang berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Kondisi ini diperkuat oleh data tahun 2023 yang menyebutkan ada sekitar 48,2% penduduk Lampung Utara tinggal di rumah yang tidak layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hadir sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki kondisi rumah secara swadaya agar layak dihuni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program BSPS dalam meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan di Desa Gunung Betuah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui Teori Efektivitas Sutrisno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan efektif. Pada aspek pemahaman program pelaksana dan penerima bantuan telah memahami tujuan, aturan, serta kewajiban swadaya. Pada aspek ketepatan sasaran, bantuan telah diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah tidak layak huni sesuai kriteria program. Pada aspek perubahan nyata dan pencapaian tujuan terlihat peningkatan kualitas fisik rumah penerima bantuan yang menjadi lebih kokoh, aman, dan layak huni. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal pada aspek ketepatan waktu karena adanya keterlambatan distribusi material, serta keterbatasan dana stimulan, sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Gunung Betuah.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Swadaya

ABSTRACT
THE EFFECTIVENESS OF THE SELF-HELP HOUSING STIMULANT
ASSISTANCE PROGRAM (BSPS) IN IMPROVING THE QUALITY OF
BENEFICIARIES' HOUSING

**(A Case Study in Gunung Betuah Village, Abung Barat District, North
Lampung Regency)**

By

FERDIAN YUSUF

Poverty remains a serious social issue in North Lampung Regency, with the percentage of the poor population reaching 16.92% in 2024, which has limited the community's ability to meet the need for adequate housing. This condition is reinforced by 2023 data indicating that approximately 48.2% of the population in North Lampung still live in uninhabitable houses. The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) was introduced as a government initiative to assist low-income communities in improving housing conditions through self-help efforts to achieve livable standards. This study aims to analyze the effectiveness of the BSPS Program in improving the quality of housing for beneficiaries in Gunung Betuah Village. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using Sutrisno's effectiveness theory. The findings indicate that the program has been implemented effectively. In terms of program understanding, both implementers and beneficiaries have adequately understood the objectives, regulations, and self-help obligations of the program. Regarding targeting accuracy, the assistance has been distributed to low-income households with uninhabitable housing conditions in accordance with program criteria. In terms of tangible change and goal achievement, there has been a noticeable improvement in the physical quality of beneficiaries' houses, making them more solid, safe, and livable. However, the program's effectiveness has not yet been fully optimal in terms of timeliness due to delays in material distribution and limitations in stimulant funding, which have become obstacles in the implementation of the BSPS Program in Gunung Betuah Village.

Keywords: Effectiveness, Self-Help Housing Stimulant Assistance Program, Self-Help Housing,

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH PENERIMA BANTUAN**

**(Studi Kasus di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat,
Kabupaten Lampung Utara)**

Oleh

Ferdian Yusuf

Skripsi

**Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

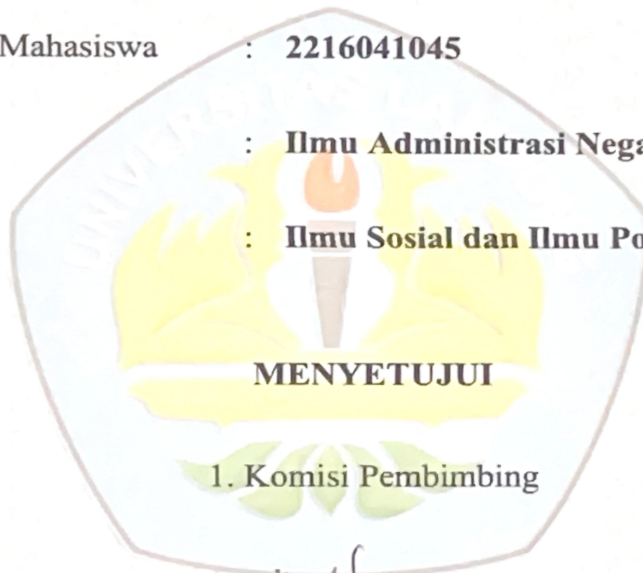
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH PENERIMA BANTUAN (Studi Kasus
di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung
Barat, Kabupaten Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa : **Ferdian Yusuf**

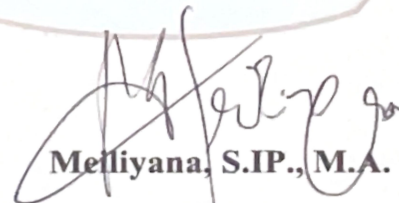
Nomor Pokok Mahasiswa : **2216041045**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

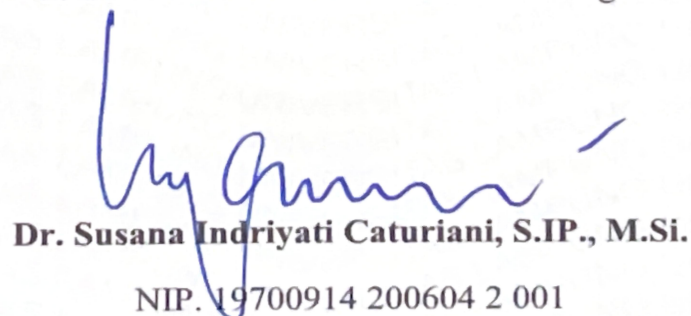


1. Komisi Pembimbing


Meliyana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

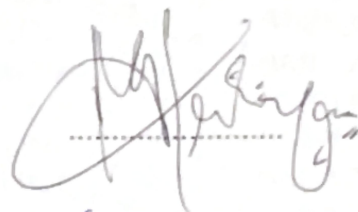

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

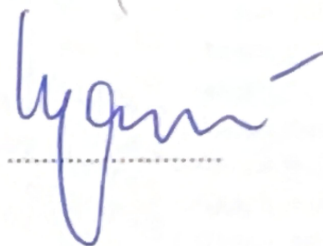
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

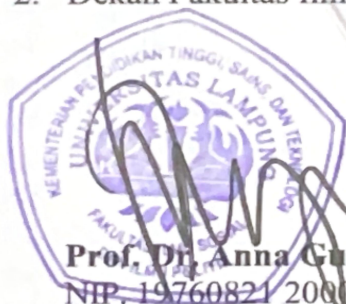
Ketua : Meiliyana, S.IP., M.A.



Penguji : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Februari 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Ferdian Yusuf

NPM. 2216041045



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ferdian Yusuf, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 Oktober 2003, dan merupakan anak tunggal. Pendidikan formal penulis diawali di TK Sriwijaya, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sukarame. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung dan kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung.

Pada tahun 2022, penulis resmi menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi internal yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai wadah pengembangan kemampuan diri dan pengalaman berorganisasi. Pada tahun pertama dan kedua, penulis bergabung sebagai anggota bidang Minat dan Bakat (MIKAT), kemudian pada tahun ketiga dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Eksternal Hubungan Masyarakat (HUMAS) di HIMAGARA. Keterlibatan tersebut memberikan banyak pengalaman dalam membangun komunikasi, kerja sama, serta tanggung jawab organisasi.

Pada bulan Januari hingga Februari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, yang memberikan kesempatan untuk memahami kondisi sosial masyarakat secara langsung. Selanjutnya pada bulan Juni, penulis menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dengan penempatan pada Bidang II *E-Government*. Berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang memperkaya wawasan dan kompetensi penulis dalam bidang administrasi negara.

MOTTO

“Education is the most powerful weapon to change the world”

(Nelson Mandela)

“Sebutlah nama-Nya,

Resapilah jalan-Nya,

Kelak kau mengingat,

Kau akan teringat.”

(Perunggu - 33x)

PERSEMBAHAN



*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,
Kupersembahkan karya ini untuk:*

Ibu Tersayang,

Yang telah menjadi alasanmu untuk terus bertahan, berjuang dan melangkah maju, terimakasih atas segala pengorbananmu yang tak kenal lelah, cinta yang tulus serta doa yang selalu menguatkan di setiap langkah perjalanan hidup ku.

Ayah Terkasih,

Almarhum yang selalu hidup dalam doa dan kenangan, terimakasih atas cinta, perjuangan, dan nilai kehidupan yang terus menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah ku.

Uncu Tercinta,

Terimakasih atas perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang selalu hadir, menjadi penguat dan pengingat bahwa diriku tidak pernah berjalan sendiri dalam setiap proses kehidupan ini.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Terimakasih atas bimbingan, ilmu, serta lingkungan pembelajaran yang telah membentuk cara berpikir dan perjalanan akademik ku sampai kini.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Penerima Bantuan (Studi Kasus Di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara)”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pembelajaran yang berharga. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan, arahan, serta doa dari banyak pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teruntuk Ibu, orang yang paling kusayang dan kuhormati di dunia ini. Pasti doamu yang lancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu, dan yang kutahu kau takkan pernah berhenti, tumbuhku kini semoga sesuai yang kau impi, tertulis jelas namaku disetiap harap malammu, tentang masa depan, tentang masa terang, pelan pasti-ku kabulkan segala catatan harapmu, kebul jalan kuterjang. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta keberkahan di dunia dan akhirat.

2. Kepada Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta perhatian yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat melalui setiap tahapan dengan lebih terarah.
3. Kepada Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku dosen pembahas sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas setiap masukan, pertanyaan reflektif, dan sudut pandang baru yang diberikan sehingga penulis terdorong untuk melihat penelitian ini lebih dalam, lebih tajam, dan lebih bermakna secara ilmiah.
4. Kepada Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas arahan, dan dukungan yang diberikan selama perjalanan studi sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan lebih terarah.
5. Kepada Ibu Dewi Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas dukungan serta peran dalam membantu kelancaran proses akademik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kepada Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh masa perkuliahan.
9. Seluruh informan penelitian, Bapak Edi, Ibu Riana, Bapak Umar, Bapak Saripudin, Bapak Murni, Bapak Ridho, Bapak Zulman serta Ibu Endang. Terimakasih atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis saat proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
10. Untuk sahabat-sahabat Subagio Family, Ziqri, Fauzan, Kodri, Chalista, Ananda, Malya, Raisa, dan Aulia, terima kasih karena telah menjadi

bagian dari perjalanan panjang sejak SMP hingga kini, berbagi tawa, cerita, dan proses tumbuh yang menjadikan persahabatan ini terasa begitu berarti. Semoga pertemanan ini kekal abadi.

11. Kepada teman-teman Dec-17 Night Photos, Devan, Ainur, Miftahul, Fauzan, Daffa, Joy, Salman, Moreno, Reza, dan Hamdi, terima kasih telah menjadi ruang pulang di tengah dinamika perkuliahan, menemani setiap langkah, dan menghadirkan kebersamaan yang saling menguatkan. Semoga kalian selalu diberikan kelancaran di setiap proses kehidupan.
12. Untuk M. Ismal Sya'bandi, terimakasih sudah mendampingi proses penelitian di Desa Gunung Betuah, Lampung Utara, bahkan melalui perjalanan panjang empat jam dengan motor yang penuh derita, semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal yang terus berbuah kebaikan di masa depan.
13. Untuk Vivi Amelia, terimakasih karena telah menjadi sahabat yang selalu hadir, menjadi tempat berbagi cerita, pendengar yang baik, serta rekan seperjuangan yang memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Untuk Regina Ardiyanti, terimakasih telah menjadi sosok yang memberikan dukungan dan menghadirkan ketenangan di saat penulis merasa takut dan ragu dalam melangkah. Terimakasih sudah selalu sabar menanggapi segala tingkah laku penulis yang menyebalkan. Semoga masa depan selalu membawa kebahagiaan dan kebaikan.
15. Untuk Caca, Zuhri, Dzahabi, Sukma, Athaya, Adepe, Aldi, Rosmila, Tasya, Ammara, Nanda, terimakasih atas kebersamaan serta kebaikan yang mengisi perjalanan perkuliahan dengan cerita dan kenangan yang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
16. Untuk seluruh teman-teman pengurus HIMAGARA periode 2025, terima kasih atas dedikasi, dinamika, dan cerita yang telah dilalui bersama, semoga setiap pengalaman yang terukir menjadi bekal berharga dalam melangkah menuju masa depan.
17. Kepada adik-adik angkatan 2023 dan 2024, Bila, Braga, Bilal, Salman, Fajar, Reza, dan Hanif, terimakasih telah kebersamaan penulis selama

berproses di HIMAGARA, semoga perjalanan akademik kalian terus dipenuhi rasa semangat dan pencapaian.

18. Kepada seluruh masyarakat Desa Gunung Betuah, khususnya Bapak Saripudin, Bapak Murni, Bapak Anton, Bapak Kosnadi, Bapak Dodi, Ibu Erna, Ibu Hamyani, Ibu Riana, Bang Sandi, Bang Rama, Bang Agus, Robet, dan Edo, terimakasih sudah menerima penulis dengan sangat hangat layaknya keluarga, kepedulian yang tulus, serta kebersamaan yang membuat masa KKN bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan pengalaman hidup yang penuh makna.
19. Untuk King Manchester United, tim sepakbola favorit penulis. Dari tim ini, penulis belajar tentang kesetiaan, kesabaran, dan semangat untuk bangkit saat diremehkan. Kemenangan kalian selalu terasa seperti hadiah yang membuat hari-hari penulis menjadi lebih berwarna dan bahagia. Terimakasih sudah mengajarkan bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya. Semoga tim ini bisa kembali ke masa jayanya, tempat yang pernah begitu megah dan membanggakan. *Glory Glory Manchester United.*
20. Teruntuk diri sendiri, terimakasih karena telah bertahan melalui setiap proses yang tidak selalu mudah, tetap melangkah meski sering diliputi ragu dan lelah, serta terus berusaha menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir, semoga ke depan selalu diberi kesuksesan, kekuatan untuk tumbuh, dan menjadi versi yang lebih baik dari hari ke hari.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	13
2.2.1. Pengertian Program.....	14
2.3 Tinjauan Tentang Efektivitas	15
2.3.1. Teori Pengukuran Efektivitas Program.....	16
2.4 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	18
2.4.1. Tujuan BSPS.....	19
2.4.2. Syarat Penerima BSPS.....	20
2.4.3. Mekanisme BSPS	20
2.4.4. Kriteria Rumah Layak Huni.....	22
2.5 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	33

3.7	Teknik Keabsahan Data	35
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1.	Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara.....	37
4.1.2.	Gambaran Umum Desa Gunung Betuah.....	40
4.2	Hasil dan Pembahasan Penelitian	42
4.2.1.	Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Penerima Bantuan di Desa Gunung Betuah.....	43
4.2.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gunung Betuah.....	89
V.	PENUTUP	99
5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Penduduk Miskin Tahun 2023-2024	1
2. Persentase Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	2
3. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Layak Tahun 2020-2024... 3	
4. Data Penerima Bantuan Program BSPS di Kecamatan Abung Barat Tahun 2022-2024	5
5. Jumlah Penerima Bantuan BSPS 2022-2024 Desa Gunung Betuah.....	6
6. Penelitian Terdahulu	11
7. Informan Penelitian.....	32
8. Daftar Dokumentasi	33
9. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Utara	38
10. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024	39
11. Daftar Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Gunung Betuah Tahun 2022	42
12. Jumlah Penghuni Rumah Penerima BSPS di Desa Gunung Betuah.....	79
13. Matriks Hasil Penelitian.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	26
2. Dokumentasi Sosialisasi BSPS di Gunung Betuah.....	45
3. Dokumentasi Pendampingan Saat di Toko Material dan Saat Proses Pembangunan	47
4. Kondisi Rumah Bapak Edi Erwanto Sebelum Program BSPS	70
5. Kondisi Kamar Mandi Bapak Edi Erwanto	71
6. Kondisi Rumah Bapak Edi Erwanto Setelah Program BSPS	72
7. Kondisi Rumah Ibu Riana Sinta Sebelum BSPS	73
8. Kondisi Kamar Mandi Ibu Riana Sinta.....	74
9. Kondisi Rumah Ibu Riana Sinta Setelah Program BSPS	75
10. Kondisi Rumah Bapak Umar Baki Sebelum BSPS	76
11. Kondisi Kamar Mandi Bapak Umar Baki Setelah BSPS.....	76
12. Kondisi Rumah Bapak Umar Baki Setelah Program BSPS.....	77

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BSPS	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
CPB	Calon Penerima Bantuan
KPB	Kelompok Penerima Bantuan
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Perbup	Peraturan Bupati
Permen	Peraturan Menteri
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RLTH	Rumah Tidak Layak Huni
Satker	Satuan Kerja
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TFL	Tenaga Fasilitator Lapangan
UMP	Upah Minimum Provinsi
WNI	Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana sebagian masyarakat tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini membuat mereka hidup di bawah standar pemenuhan kebutuhan minimum yang dianggap layak dalam masyarakat (Aswanto dan Edward, 2025). Sementara itu, *United Nations* menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia mencakup kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, pakaian, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan individu (Soleh, 2014). Pada Provinsi Lampung, masalah kemiskinan masih dialami oleh masyarakat di berbagai kabupaten/kota. Situasi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak semata persoalan ekonomi, melainkan juga masalah sosial yang bersifat kompleks serta perlu penanganan berkelanjutan. Berikut ini data jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Data Penduduk Miskin Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
		2023	2024	2023	2024
1	Lampung Utara	107,21	105,91	17,17	16,92
2	Lampung Timur	148,26	142,70	13,80	13,19
3	Pesisir Barat	21,45	20,22	13,49	12,64
4	Lampung Selatan	133,67	132,38	12,79	12,57
5	Pesawaran	59,29	55,01	12,89	11,86
	Provinsi Lampung	970,67	941,23	11,11	10,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1. Penduduk Miskin Tahun 2023-2024, dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Utara menjadi wilayah dengan penduduk miskin tertinggi di Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, tercatat bahwa 105,91 ribu penduduk miskin tinggal di wilayah ini, yang menunjukkan bahwa sekitar 16,92% dari total penduduk Lampung Utara hidup dalam kemiskinan. Angka kemiskinan yang signifikan ini berdampak besar pada kemampuan masyarakat untuk memiliki atau memperbaiki tempat tinggal yang layak. Data tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Persentase Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni
1	Metro	86,47
2	Pringsewu	78,93
3	Lampung Selatan	77,30
4	Pesawaran	73,97
5	Lampung Timur	69,43
6	Bandar Lampung	68,93
7	Lampung Tengah	66,02
8	Tulang Bawang	55,33
9	Pesisir Barat	52,55
10	Lampung Utara	51,80
	Provinsi Lampung	63,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2. Persentase Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023, sebanyak 51,8% rumah di Lampung Utara dapat tergolong rumah yang layak huni, artinya sebanyak 48,2% penduduk Lampung Utara masih tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini menunjukkan terdapat sejumlah rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan fisik, dengan kondisi atap yang bocor, dinding yang rapuh, dan lantai yang tidak rata, pada akhirnya mengurangi kenyamanan penghuninya. Rumah pada dasarnya merupakan kebutuhan sosial yang sangat menentukan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Idris dkk, 2023). Rumah tidak layak huni juga sering kali tidak dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti sanitasi yang layak, yang semakin memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Untuk itu, data mengenai rumah tangga yang mempunyai sanitasi yang layak akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Layak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Metro	99,35	94,64	98,77	98,89	99,68
2	Lampung Selatan	82,25	94,40	94,29	95,58	96,40
3	Bandar Lampung	92,32	95,45	89,07	92,85	89,33
4	Pesawaran	77,28	83,73	86,20	88,73	87,85
5	Tulang Bawang	79,81	84,83	85,60	84,49	86,97
6	Pringsewu	84,64	88,91	84,22	88,72	86,7
7	Lampung Timur	83,53	86,29	85,27	84,16	86,38
8	Lampung Barat	73,08	76,50	83,75	83,95	84,40
9	Pesisir Barat	70,42	76,68	77,74	79,23	84,09
10	Mesuji	75,79	78,98	84,63	81,14	83,31
11	Lampung Tengah	66,89	79,37	81,25	80,20	82,55
12	Way Kanan	74,03	78,66	73,86	78,48	81,38
13	Tulang Bawang Barat	75,21	75,33	77,89	77,09	80,85
14	Lampung Utara	79,69	75,03	80,82	80,23	77,74
15	Tanggamus	69,81	68,96	63,99	67,82	70,82
	Provinsi Lampung	78,81	83,89	83,65	84,58	85,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Sanitasi Layak Tahun 2020-2024, di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 77,74%. Persentase tersebut menempatkan Lampung Utara di urutan ke-14 dari total 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Posisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Lampung Utara masih menghadapi keterbatasan untuk mengakses sanitasi yang layak. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), malaria, demam berdarah, penyakit kulit, hingga diare yang berawal dari kondisi tidak bersih sehingga memicu berkembangnya sumber penyakit (Rasyidah, 2019). Oleh karena itu, peningkatan akses sanitasi layak di Lampung Utara perlu menjadi prioritas sebagai langkah untuk memperbaiki taraf hidup serta kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022, pemerintah menetapkan besaran bantuan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan tingkat kesulitan pembangunan di setiap wilayah. Untuk wilayah reguler di luar Papua dan Papua Barat, bantuan yang diberikan sebesar Rp20.000.000 per unit rumah, terdiri dari Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah tenaga kerja. Sementara itu, bagi wilayah datar perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua dan Papua Barat, bantuan yang diterima mencapai Rp23.500.000 per unit rumah, dengan rincian Rp18.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp5.000.000 untuk tenaga kerja. Adapun untuk wilayah pulau-pulau kecil, daerah terpencil, dan kawasan pegunungan di Papua dan Papua Barat, besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp40.000.000 per unit rumah, meliputi Rp35.000.000 untuk bahan bangunan dan Rp5.000.000 untuk upah kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pasal 11 ayat (1) menyatakan BSPS ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang harus memenuhi sejumlah kriteria penting. Mereka harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berkeluarga, serta menguasai atau memiliki lahan tempat rumah akan dibangun yang sah secara hukum. Selain itu, rumah yang ditempati harus tergolong tidak layak huni, dan penerima belum pernah mendapatkan bantuan perumahan sejenis, dengan ketentuan penghasilan tidak melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP). Program ini juga menekankan pentingnya gotong royong dan keswadayaan, di mana masyarakat didorong untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan rumah, sehingga bantuan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga membangun nilai kebersamaan dan kemandirian di tengah masyarakat.

Pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Utara tercatat sebagai salah satu dari empat daerah di Provinsi Lampung yang menerima program BSPS. Keempat daerah itu adalah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Utara sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Lampung Utara termasuk dalam daerah sasaran program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan program tersebut kemudian didistribusikan ke beberapa wilayah kecamatan di Lampung Utara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Salah satu kecamatan yang menerima alokasi bantuan tersebut adalah Kecamatan Abung Barat, berikut ini disajikan data penerima BSPS di Kecamatan Abung Barat selama periode tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 4. Data Penerima Bantuan Program BSPS di Kecamatan Abung Barat Tahun 2022-2024

No.	Nama Desa	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Tahun			
		2022	2023	2024	Total
1.	Hujan Mas	4	5	19	28
2.	Kamplas	10	6	10	26
3.	Gunung Betuah	5	5	15	25
4.	Way Wakak	10	5	10	25
5.	Pematang Kasih	5	5	8	18
6.	Tanjung Harta	5	5	5	15
7.	Ogan Lima	5	5	0	10
8.	Cahaya Negeri	0	0	10	10
9.	Kistang	0	5	0	5
10.	Lepang Besar	0	5	0	5
TOTAL		44	46	77	167

Sumber: Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung, 2026

Berdasarkan tabel 4, sebaran penerima bantuan BSPS di 10 desa di Kecamatan Abung Barat selama periode 2022–2024 memperlihatkan bahwa kebutuhan perbaikan rumah layak huni di wilayah ini masih cukup besar dan tersebar di berbagai desa. Total penerima yang mencapai 167 unit menunjukkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi isu nyata yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah di kecamatan ini. Beberapa desa seperti Hujan

Mas, Kamplas, Way Wakak, dan Gunung Betuah berada pada kelompok dengan jumlah penerima tertinggi, yang menunjukkan adanya konsentrasi kebutuhan pada wilayah ini. Di sisi lain, ada desa seperti Kistang dan Leping Besar yang memiliki jumlah penerima yang rendah. Perbedaan ini menggambarkan bahwa kondisi hunian masyarakat di Abung Barat bersifat beragam, sehingga distribusi bantuan tidak dapat disamaratakan dan perlu menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa.

Berdasarkan data tersebut, Desa Gunung Betuah menjadi menarik untuk dikaji karena berada pada kelompok desa dengan jumlah penerima tertinggi, yakni urutan ketiga selama periode 2022–2024. Posisi ini menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki tingkat kebutuhan yang cukup besar dibandingkan sebagian desa lainnya di Kecamatan Abung Barat. Selain itu, jumlah penerima yang cukup tinggi memberikan peluang untuk melihat realitas pelaksanaan program pada wilayah yang menerima intervensi dalam skala signifikan, sehingga dinamika pelaksanaan dan pengalaman masyarakat dapat diamati secara lebih mendalam. Keberadaan Desa Gunung Betuah dalam kelompok desa prioritas juga memperkuat alasan pemilihan lokasi penelitian karena dapat merepresentasikan pelaksanaan program pada wilayah dengan tingkat kebutuhan hunian yang tinggi. Berikut ini data penerima BSPS di Desa Gunung Betuah selama periode tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 5. Jumlah Penerima Bantuan BSPS 2022-2024 Desa Gunung Betuah

No	Nama Penerima	Alamat Tempat Tinggal	Tahun Penerimaan
1	Tajudin	Dusun 6 Simpang Inpres	2022
2	Jayus	Dusun 4 Olok Nila	2022
3	Edi Erwanto	Dusun 1 Talang Sembilan	2022
4	Saparudin	Dusun 7 Bumi Jaya	2022
5	Hotman	Dusun 1 Talang Sembilan	2022
6	Riana Sinta	Dusun 4 Olok Nila	2023
7	Sumantri	Dusun 6 Simpang Inpres	2023
8	Edi Gunawan	Dusun 1 Talang Sembilan	2023
9	Rusti	Dusun 1 Talang Sembilan	2023
10	Jusman	Dusun 7 Bumi Jaya	2023
11	Alamsyah	Dusun 7 Bumi Jaya	2024
12	Ernawati	Dusun 7 Bumi Jaya	2024
13	Umar Baki	Dusun 4 Olok Nila	2024
14	Senin	Dusun 4 Olok Nila	2024
15	Anton	Dusun 4 Olok Nila	2024
16	Rosnida	Dusun 6 Simpang Inpres	2024

17	Karnadi	Dusun 6 Simpang Inpres	2024
18	Desra	Dusun 6 Simpang Inpres	2024
19	Saprudin	Dusun 6 Simpang Inpres	2024
20	Sarbini	Dusun 7 Bumi Jaya	2024
21	Agus	Dusun 7 Bumi Jaya	2024
22	Erwan	Dusun 7 Bumi Jaya	2024
23	Siti Sholmah	Dusun 7 Bumi Jaya	2024
24	Indra	Dusun 7 Bumi Jaya	2024
25	Abdul Kholik	Dusun 3 Gunung Timbul	2024

Sumber: Pemerintah Desa Gunung Betuah, 2025

Berdasarkan data pada tabel 5, jumlah penerima bantuan BSPS di Desa Gunung Betuah menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 dan 2023 jumlah penerima stabil, masing-masing sebanyak 5 unit, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 15 unit pada tahun 2024. Lonjakan ini dapat diartikan sebagai respons terhadap kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak huni. Selain itu, peningkatan jumlah penerima juga dapat mencerminkan proses pendataan yang semakin optimal atau adanya prioritas kebijakan yang lebih diarahkan pada wilayah dengan kebutuhan yang dinilai lebih mendesak. Dengan demikian, dinamika jumlah penerima di Gunung Betuah tidak hanya menunjukkan pertumbuhan angka semata, melainkan pertanda adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan.

Meski dirancang sebagai solusi, pelaksanaan program BSPS di lapangan tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Hal ini juga tampak di Desa Gunung Betuah. Persoalan muncul terkait besaran stimulan yang bagi sejumlah penerima bantuan dirasakan belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan. Biaya material bangunan rumah yang tinggi serta harganya yang fluktuatif menyebabkan penerima bantuan harus menambah dana dari sumber pribadi agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai standar kelayakan. Selain itu, muncul kritik dari masyarakat umum mengenai cara pemerintah desa menentukan calon penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya jelas. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan beragam persepsi di masyarakat mengenai pelaksanaan program.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Lampung Utara dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya angka kemiskinan yang berimplikasi pada banyaknya

rumah tidak layak huni, sehingga pelaksanaan program BSPS di wilayah ini menjadi upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Desa Gunung Betuah kemudian ditetapkan sebagai fokus penelitian karena secara rutin menerima program BSPS dari pemerintah pada tahun 2022–2024 dan dalam pelaksanaannya, program ini masih menyisakan beberapa persoalan, seperti keterbatasan dana stimulan serta munculnya kritik dari masyarakat mengenai kejelasan proses penentuan penerima bantuan. Oleh karena itu, Desa Gunung Betuah menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas program BSPS dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian mengenai efektivitas program BSPS memang telah dilaksanakan di berbagai daerah, salah satunya yang dilakukan oleh Rahmawati (2024) tentang “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai cara pengumpulan data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Sribasuki cukup efektif, dengan aspek keberhasilan seperti ketepatan penerima, sosialisasi, pencapaian tujuan, serta pengawasan, namun masih terdapat kendala pada kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan kurangnya pemahaman penerima bantuan tentang tata cara penggunaan dana. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu keduanya berfokus pada menilai efektivitas program BSPS di Kabupaten Lampung Utara. Namun, penelitian ini memiliki keterbaruan karena mengkaji pelaksanaan program BSPS di Desa Gunung Betuah yang secara rutin menerima bantuan perumahan dari pemerintah pada tahun 2022–2024. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi perhatian pemerintah terhadap desa tersebut dalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, baik dari sisi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini penting karena dapat memperkaya referensi mengenai pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa,

khususnya dalam bidang perumahan swadaya. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana bantuan dijalankan, bagaimana penerima merasakan manfaatnya, serta sejauh mana tujuan program tercapai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun kebijakan perumahan untuk memastikan bahwa program BSPS dapat menghadirkan manfaat kepada masyarakat, khususnya di daerah dengan tantangan perumahan dan kemiskinan seperti yang terjadi di Lampung Utara. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Penerima Bantuan: Studi Kasus di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara?
2. Apa saja faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan program BSPS di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan program BSPS di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan aparat desa dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan serta efektivitas pelaksanaan program BSPS. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian PUPR dalam merancang kebijakan perumahan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat perdesaan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai efektivitas program pemerintah dalam sektor perumahan swadaya serta dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dipahami sebagai sekumpulan hasil kajian yang dilaksanakan oleh peneliti lain dan memiliki relevansi dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran tentang topik atau isu yang sama, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Serta, dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kesamaan atau plagiarisme meskipun itu terjadi karena kebetulan saja. Untuk itu, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang sedang diteliti:

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Penulis & Tahun	Teori & Metode	Hasil Penelitian
1	Efektivitas Pelaksanaan Program BSPS di Kelurahan Sribasuki, Kotabumi, Lampung Utara (Rahmawati, 2024)	Teori yang digunakan adalah teori efektivitas Subagyo (indikator: ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, pengawasan). Dengan metode kualitatif deskriptif.	Program cukup efektif: sasaran tepat, sosialisasi baik, rumah meningkat kualitasnya. Namun masih ada kendala dalam hal pengawasan pemerintah daerah yang kurang optimal dan penerima belum sepenuhnya paham penggunaan dana.
2	Evaluasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Pesawaran (Arahap, 2021)	Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan Hamalik. Dengan metode kualitatif deskriptif.	Perencanaan & pengembangan cukup baik sesuai dengan RPJMD. Namun pengawasan & efisiensi rendah, baru 24,53% RTLH tertangani (2.123 unit dari 8.645). Banyak rumah kembali tidak layak karena minim dirawat

No	Judul, Nama Penulis & Tahun	Teori & Metode	Hasil Penelitian
3	Implementasi Program BSPS untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Heaweia, Ngada (Tua, 2022)	Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi). Dengan metode kualitatif deskriptif.	Program dinilai belum berjalan optimal karena adanya kendala sedikitnya informasi akibat tidak tersedianya jaringan telepon, kurangnya dana dan bahan bangunan. Dampaknya, pembangunan rumah sering terhambat meskipun tujuan kesejahteraan tetap diarahkan.
4	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa (Desyra, Dengo & Londa, 2021)	Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dengan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BSPS belum berjalan maksimal karena keterbatasan dana stimulan dan lemahnya sumber daya pelaksana. Keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan swadaya masyarakat serta dukungan aparatur desa dan fasilitator lapangan.
5	Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong (Khairunisa & Hayati, 2021)	Teori yang digunakan yaitu model evaluasi formatif-sumatif dari Michael Scriven. Lalu metode penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif.	Program BSPS di Desa Mangkusip dinilai sangat berhasil. Berdasarkan indikator sehat program dinilai berhasil, serta dari indikator aman dan nyaman, program dinilai sangat berhasil. Penilaian ini menunjukkan bahwa tujuan program tercapai dengan baik sesuai kriteria rumah layak huni.
6	Peran Keswadayaan dalam Upaya Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan (Mutia, Setiawati & Wahed, 2023)	Teori yang digunakan yaitu teori evaluasi kebijakan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menemukan bahwa Program BSPS mampu meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni melalui optimalisasi swadaya masyarakat. Swadaya penerima bantuan berperan penting dalam menutup kekurangan dana stimulan sehingga pembangunan rumah dapat diselesaikan sesuai standar.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat ditemukan kesamaan dengan penelitian ini, terutama pada tema besar yang menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan. Mayoritas penelitian

menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan utamanya sama, yakni memberikan gambaran mengenai sejauh mana program BSPS dijalankan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni.

Meskipun demikian, setiap penelitian terdahulu memiliki ciri khas yang membedakannya. Penelitian Rahmawati (2024) menggunakan teori efektivitas Subagyo dengan fokus pada indikator ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pengawasan. Penelitian Arahap (2021) menitikberatkan pada teori evaluasi kebijakan Hamalik, sementara penelitian Tua (2022) mengadopsi model implementasi Edwards III. Berbeda lagi dengan penelitian Desyra dkk. (2021) yang menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, serta penelitian Khairunisa dan Hayati (2021) yang mengacu pada teori evaluasi formatif-sumatif Michael Scriven. Kemudian penelitian Mutia dkk. (2023) yang menggunakan teori evaluasi kebijakan. Sedangkan, penelitian ini akan menggunakan teori efektivitas Sutrisno sebagai alat analisis dengan fokus pada indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Menurut Dye (2013), kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Konsep ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan nyata, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak, karena keduanya memiliki konsekuensi bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu, Sabatier (2007) memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi kompleks antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan dalam jangka waktu panjang. Kebijakan terbentuk melalui koalisi advokasi yang berperan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan berdasarkan sistem nilai dan keyakinan tertentu, sehingga pemahaman terhadap kebijakan publik memerlukan analisis mendalam terhadap dinamika antaraktor, institusi, dan ide dalam *policy subsystem*.

Menurut Peters (2003), kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah publik melalui proses politik dan administrasi yang kompleks. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan tidak berhenti pada keputusan formal, tetapi juga mencakup mekanisme implementasi, evaluasi, serta penyesuaian terhadap konteks sosial dan politik yang berkembang. Selanjutnya Menurut Nugroho (2023), kebijakan publik sebagai keputusan strategis yang dibuat negara untuk mencapai tujuan nasional dan menjalankan mandat konstitusional demi kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan perlu dirancang secara rasional, partisipatif, dan berbasis data agar mampu menyelesaikan permasalahan publik secara efektif. Selaras dengan itu, Widodo (2021) mendefinisikan kebijakan publik sebagai upaya sistematis pemerintah untuk memecahkan persoalan yang berkembang di masyarakat melalui proses yang terukur dan analisis yang matang agar tidak menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Kemudian Sutmasa (2021) kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk menghasilkan suatu *output* atau *outcomes* melalui kegiatan atau aksi tertentu. Sutmasa juga menegaskan bahwa betapa pun baiknya rumusan suatu kebijakan publik, kebijakan tersebut tidak akan bermakna apabila gagal dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan strategis yang dibuat pemerintah untuk memecahkan persoalan masyarakat melalui proses yang rasional, terukur, dan melibatkan berbagai aktor. Dalam prosesnya, kebijakan melibatkan interaksi politik, birokrasi, dan partisipasi masyarakat yang saling memengaruhi dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam menerjemahkan kepentingan rakyat ke dalam tindakan konkret demi tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama.

2.2.1. Pengertian Program

Kebijakan publik merupakan kerangka kerja umum yang berisi serangkaian langkah pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai kegiatan

terencana yang terwujud dalam bentuk program (Kristian, 2023). Menurut Yarbrough *et al.* (dalam Munthe, 2015), program merupakan susunan aktivitas yang dirancang secara sistematis melalui pemanfaatan sumber daya tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik individu atau kelompok dalam suatu konteks, serta menghasilkan keluaran, hasil, dan dampak yang dapat diukur. Menurut Arikunto dan Jabar (2009), program merupakan suatu rencana yang telah disusun untuk kemudian dilaksanakan. Menurut Widoyoko (2013), program merupakan rangkaian aktivitas yang disusun secara matang, serta berlangsung secara berkelanjutan, dan dilaksanakan dalam organisasi dengan keterlibatan sejumlah individu. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, program dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk dilaksanakan dalam bentuk upaya konkret serta berkesinambungan dengan menyertakan partisipasi sejumlah pihak.

2.3 Tinjauan Tentang Efektivitas

Pelaksanaan suatu program perlu dinilai untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut berkaitan erat dengan konsep efektivitas sebagai pencapaian tujuan program. Menurut Siagian (2015), efektivitas dapat dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya, serta fasilitas yang tersedia sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan untuk menghasilkan barang/jasa melalui kegiatan tertentu, kemudian akan terlihat efektif apabila hasil kegiatannya mengarah kepada tujuan dan sasaran awal, apabila semakin dekat maka akan semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Lalu, menurut Sedarmayanti (2009), efektivitas adalah konsep yang menyampaikan gambaran sejauh mana suatu target bisa terlaksana dan menurut Efendi (2010), efektivitas adalah sebuah konsep komunikasi yang dalam prosesnya bertujuan untuk mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya selaras dengan anggaran biaya, waktu, dan jumlah anggota yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang efektivitas tersebut, maka efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan atas sebuah kegiatan yang sudah direncanakan. Sebuah kegiatan dinilai efektif ketika hasil yang didapatkan selaras dengan target yang direncanakan serta mendekati sasaran yang diharapkan. Dalam

prosesnya, efektivitas juga menuntut adanya pemanfaatan sumber daya secara tepat, baik itu waktu, biaya, maupun tenaga yang tersedia. Semakin tepat penggunaan sumber daya dan semakin dekat hasil dengan tujuan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu kegiatan.

2.3.1. Teori Pengukuran Efektivitas Program

Efektivitas program pada dasarnya diukur melalui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dalam konteks program sosial seperti BSPS, efektivitas berarti keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengukur efektivitas suatu program, berikut ini terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan:

Menurut Budiani (2007), suatu program dikatakan efektif jika telah memenuhi beberapa aspek berikut:

- a. Ketepatan sasaran berhubungan dengan tingkat kesesuaian antara penerima program dan sasaran yang telah direncanakan.
- b. Sosialisasi program berkaitan dengan kemampuan pelaksana program dalam melaksanakan sosialisasi sehingga informasi pelaksanaan program tersampaikan kepada masyarakat umum serta target penerima program.
- c. Tujuan program berkaitan dengan tingkat ketepatan antara hasil pelaksanaan dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.
- d. Pemantauan program menilai kegiatan pengawasan setelah pelaksanaan untuk memastikan perhatian dan dukungan terhadap penerima program tetap terjaga.

Menurut Sutrisno (2010), suatu program dikatakan efektif jika telah memenuhi beberapa aspek berikut:

- a. Pemahaman program mengacu pada kemampuan pelaksana dan penerima bantuan dalam memahami arah, tujuan, serta aturan yang ada dalam sebuah program.

- b. Ketepatan waktu menunjukkan keselarasan pelaksanaan dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya, karena pelaksanaan yang tepat waktu berpengaruh terhadap hasil program.
- c. Ketepatan sasaran dilihat dari tingkat kesesuaian target program dengan realisasinya di lapangan.
- d. Perubahan nyata dampak yang dirasakan oleh pihak yang menerima program, jika terdapat perubahan kearah yang lebih baik maka program dapat dikatakan berhasil.
- e. Pencapaian tujuan menunjukkan kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan tujuan yang telah ditetapkan serta manfaat yang diterima oleh sasaran program.

Menurut Campbell (1989), suatu program dikatakan efektif jika telah memenuhi beberapa aspek berikut:

- a. Keberhasilan program menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Program yang terlaksana secara maksimal mencerminkan efektivitas yang tinggi.
- b. Keberhasilan sasaran menunjukkan ketepatan penentuan penerima manfaat berdasarkan hasil atau *output* program.
- c. Kepuasan terhadap program menggambarkan tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap kualitas barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan program.
- d. Tingkat *input* dan *output* menunjukkan keberhasilan program ketika hasil yang dicapai lebih unggul dibandingkan sumber daya yang digunakan selama pelaksanaan.
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh menggambarkan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan program hingga target yang telah dirumuskan dapat tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan beberapa teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli, penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2010) sebagai acuan. Pemilihan teori ini sesuai dengan konteks BSPS, karena program ini menuntut kejelasan informasi bagi masyarakat penerima, pelaksanaan yang

tepat waktu sesuai jadwal, serta sasaran yang benar-benar menyentuh warga berpenghasilan rendah. Selain itu, pencapaian tujuan program tercermin dari meningkatnya kualitas rumah penerima bantuan, dan perubahan nyata terlihat dari kondisi fisik hunian yang lebih layak. Dengan demikian, aspek-aspek yang dijelaskan oleh Sutrisno memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai tingkat keberhasilan BSPS dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat penerima bantuan.

2.4 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Rumah layak huni merupakan salah satu tujuan utama kebijakan pemerintah di bidang perumahan yang diwujudkan melalui berbagai program pembangunan dan perbaikan hunian, mengingat masih banyak masyarakat yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Rumah layak huni pada hakikatnya adalah kebutuhan pokok manusia, sebab rumah tak hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai ruang pembentukan karakter keluarga, hal ini sejalan dengan UU No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat (7) yang menegaskan bahwa rumah merupakan hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak, guna membina keluarga dan merupakan simbol harkat dan martabat yang menempatinnya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Amara dkk. (2024), BSPS merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga yang pendapatannya rendah guna mendorong kemandirian masyarakat untuk memperbaiki dan membangun rumah serta sarana pendukungnya. Menurut Roman (2022), BSPS merupakan program stimulan sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, di mana dana yang diberikan tidak menanggung seluruh biaya, melainkan bertujuan memicu swadaya dan gotong royong masyarakat dalam memperbaiki rumah. Sedangkan menurut Fitri (2024), BSPS ialah bentuk dukungan pemerintah berupa bantuan yang diberikan kepada warga yang pendapatannya rendah untuk

memperkuat kelayakan rumah maupun membangun hunian baru yang sesuai standar kelayakan yang menekankan untuk adanya keswadayaan dalam pembangunannya.

Konsep dasar BSPS bertumpu pada gagasan bahwa perumahan adalah hak dasar setiap warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (7) UU No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hunian tidak hanya dipandang sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai sarana penting untuk membina keluarga, serta cerminan harkat martabat penghuninya. BSPS berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, menurut Ife (dalam Salan dkk., 2023) pemberdayaan adalah proses penyediaan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka mampu mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu BSPS juga wujud nyata dari prinsip *self-help housing* sebagaimana dijelaskan Bebbe dan Poerwanto (2023) yaitu sebuah upaya swadaya masyarakat dalam mewujudkan hunian mereka sendiri, di mana proses pembangunan dijalankan secara mandiri oleh warga sementara peran pemerintah atau pihak pendamping sebatas memfasilitasi dan membimbing mereka agar memahami tanggung jawab serta langkah yang harus dijalankan. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, BSPS dapat disimpulkan sebagai program pemerintah yang bertujuan membantu warga dengan pendapatan rendah untuk memperbaiki atau mendirikan hunian yang layak. Bantuan ini bersifat stimulan berupa dana, bahan bangunan, dan pendampingan teknis, sehingga mendorong swadaya dan gotong royong masyarakat.

2.4.1. Tujuan BSPS

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tujuan BSPS adalah sebagai berikut:

- a. Membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah dengan memberikan bantuan stimulan sehingga keterbatasan ekonomi tidak menghalangi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak.

- b. Mendorong tumbuhnya keswadayaan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, sehingga masyarakat tetap berperan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima bantuan.
- c. Mewujudkan rumah layak huni yang sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, dan kecukupan ruang agar rumah dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi penghuninya..

2.4.2. Syarat Penerima BSPS

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pasal 11 ayat (1) menyatakan penerima BSPS merupakan MBR yang harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berkeluarga,
- b. Memiliki atau menguasai lahan untuk tempat rumah akan dibangun yang sah secara hukum,
- c. Rumah yang ditempati harus tergolong tidak layak huni, dan belum pernah mendapatkan bantuan perumahan sejenis,
- d. Berpenghasilan tidak melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP),
- e. Bersedia untuk berswadaya.

2.4.3. Mekanisme BSPS

Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Pasal 12 hingga Pasal 25 menyebutkan bahwa mekanisme pelaksanaan Program BSPS meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Pengusulan Lokasi BSPS
 - a. Usulan lokasi diajukan oleh bupati atau wali kota dengan tembusan kepada gubernur kepada Menteri PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
 - b. Usulan tersebut harus dilengkapi dengan data nama desa atau kelurahan yang mencakup jumlah rumah tidak layak huni dan kebutuhan rumah swadaya.

- c. Pemerintah provinsi melakukan verifikasi usulan berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah rumah tidak layak huni, serta kepedulian daerah dalam bidang perumahan.

2. Penetapan Lokasi

- a. Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri PUPR menetapkan lokasi BSPS untuk tingkat kabupaten/kota.
- b. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan kemudian menetapkan lokasi BSPS di tingkat desa atau kelurahan.

3. Penyiapan Masyarakat

- a. Dilaksanakan di lokasi BPS melalui pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
- b. TFL berperan dalam memberdayakan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaporan dan pengelolaan pascakegiatan.
- c. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi, verifikasi calon penerima, rembuk warga, pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), serta penyusunan proposal kebutuhan bahan bangunan.

4. Penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB)

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memeriksa proposal yang diajukan oleh calon penerima.
- b. Hasil pemeriksaan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) untuk menetapkan penerima bantuan secara resmi.

5. Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Bantuan

- a. Pencairan dana BPS dilakukan melalui bank atau pos penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana disalurkan langsung ke rekening penerima dan digunakan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah kerja.
- c. Pemanfaatan bantuan dilaksanakan dalam dua tahap masing-masing 50%, sesuai dengan rencana penggunaan dana yang disetujui.

6. Pengadaan dan Penyerahan BSPS Bentuk Barang

- a. Pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Penyerahan dilakukan secara resmi kepada penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku.

7. Pelaporan

- a. Penerima BSPS, dengan pendampingan TFL, wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada PPK.
- b. Laporan juga disampaikan oleh bank/pos penyalur, koordinator fasilitator, serta Satker hingga ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

2.4.4. Kriteria Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 5 ayat (2) hingga (5), rumah layak huni harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu:

1. Keselamatan Bangunan

- a. Struktur rumah harus kokoh dan mampu melindungi penghuninya dari risiko runtuh.
- b. Fondasi, dinding, dan atap wajib menggunakan material sesuai standar teknis.
- c. Rumah harus tahan terhadap gangguan lingkungan seperti hujan, angin, dan bencana tertentu.

2. Kesehatan Penghuni

- a. Rumah wajib mempunyai ventilasi yang memadai sehingga sirkulasi udara berjalan baik.
- b. Pencahayaan alami harus memadai untuk mendukung aktivitas harian dan mengurangi kelembapan.
- c. Harus tersedia sarana air bersih serta sistem pembuangan limbah rumah tangga.

3. Kecukupan Luas Minimum

- a. Rumah harus memiliki luas lantai minimal 36 m².
- b. Ruang dalam hunian harus cukup untuk menampung seluruh anggota keluarga tanpa menimbulkan kepadatan berlebih.
- c. Ketersediaan ruang tidur, ruang keluarga, dan dapur menjadi bagian dari standar kelayakan.

Kriteria pertama, keselamatan bangunan, memiliki arti penting karena menyangkut aspek perlindungan hidup. Rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan sangat rawan menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk kerusakan materi maupun ancaman terhadap jiwa penghuni. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah menetapkan pedomannya melalui Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Utara No. 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pasal 27 ayat (3) pada regulasi ini menyebutkan bahwa:

- a. Lantai menggunakan cor beton dengan permukaan rata dan halus.
- b. Dinding tersusun dari bata merah yang dilapisi plester luar, atau batako yang tersusun rapi tanpa plester.
- c. Atap memakai seng bergelombang, asbes bergelombang, atau genteng.
- d. Terdapat pintu dan jendela berukuran standar lokal, serta ventilasi yang cukup untuk cahaya alami dan sirkulasi udara dalam rumah.

Kriteria kedua, kesehatan penghuni, menekankan bahwa rumah harus mendukung terciptanya kondisi rumah yang sehat dan higienis. Aspek-aspek yang wajib dipenuhi untuk sebuah rumah dapat dikatakan sehat antara lain yaitu ventilasi yang memadai, pencahayaan yang baik, fasilitas sanitasi yang memadai, dan aksesibilitas air bersih (Pamungkas dan Bawono, 2025). Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), standar dan persyaratan sanitasi layak adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Atas
 - a. Berfungsi melindungi pengguna dari cuaca dan gangguan luar, dilengkapi dinding dan atap yang kokoh serta tertutup untuk menjaga privasi.
2. Bangunan Tengah
 - a. Lubang pembuangan tinja dan urine harus saniter dengan konstruksi leher angsa.
 - b. Untuk jamban semi-saniter, lubang dapat tanpa leher angsa tetapi harus memiliki penutup.
 - c. Lantai jamban dibuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan memiliki saluran pembuangan.
3. Bangunan Bawah
 - a. Berfungsi menampung dan mengolah tinja agar tidak mencemari lingkungan. Terdiri atas:
 - 1) Tangki septik, yaitu bak kedap air untuk menampung dan menguraikan limbah dengan cairan dialirkan ke resapan atau filter.
 - 2) Cubluk, yaitu lubang galian untuk menampung limbah yang meresapkan cairan tanpa mencemari air tanah, dengan dinding diperkuat agar aman dari longsor.

Kriteria ketiga, kecukupan luas bangunan, menunjukkan bahwa standar kelayakan rumah juga ditentukan oleh aspek ruang yang memadai. Dalam konteks lokal, Pasal 27 ayat (2) Perbup Lampung Utara No. 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengatakan bahwa, kecukupan minimal luas lantai bangunan adalah 36 m² atau 9 m² per anggota keluarga.

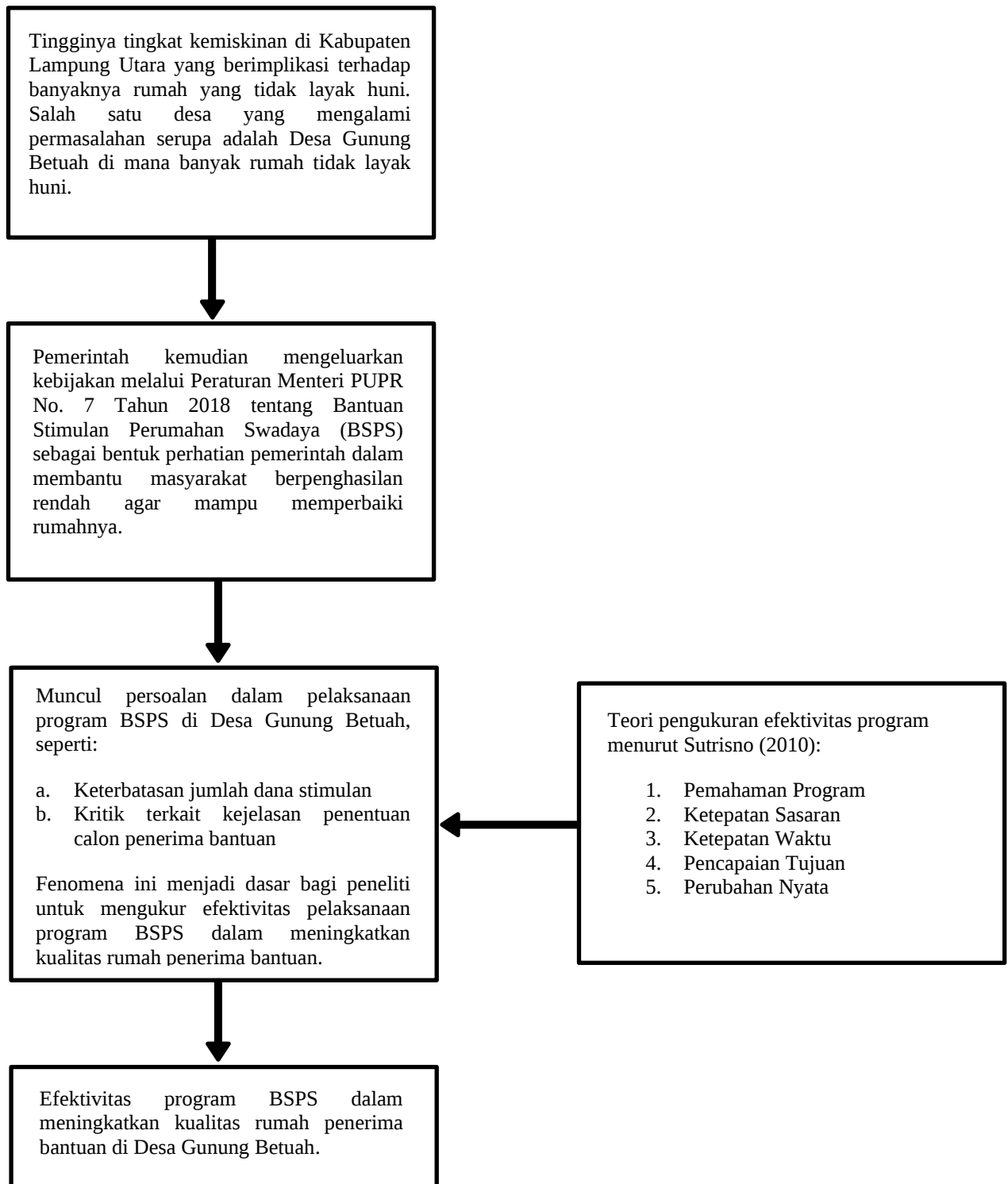
Secara keseluruhan, rumah layak huni adalah kombinasi dari tiga kriteria pokok yang saling berkaitan yaitu keamanan bangunan, kesehatan penghuninya, dan ketersediaan ruang yang cukup. Ketiga unsur ini menjadi standar umum dalam menilai kelayakan sebuah rumah. Pemerintah melalui program BSPS berupaya memastikan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengakses rumah dengan kriteria tersebut

2.5 Kerangka Pikir

Menurut Widayat dan Amirullah (dalam Rita, 2023), kerangka berpikir adalah suatu pola pemikiran yang menunjukkan kaitan teori dengan unsur-unsur yang dianggap relevan terhadap masalah penelitian. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai topik yang menjadi pusat perhatian penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara yang berimplikasi pada banyaknya rumah tidak layak huni di wilayah ini. Kondisi tersebut juga tampak di Desa Gunung Betuah, di mana sebagian besar masyarakat menghadapi keterbatasan ekonomi yang membuat mereka sulit memperbaiki tempat tinggalnya. Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak terhadap kebijakan yang mampu mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat miskin.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah kemudian menghadirkan solusi melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dirancang untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu memperbaiki rumahnya secara mandiri dengan bantuan dana stimulan dari pemerintah. Pelaksanaan BSPS di Desa Gunung Betuah telah berlangsung secara rutin sejak tahun 2022 hingga 2024. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini tidak lepas dari berbagai persoalan seperti keterbatasan jumlah dana stimulan dan munculnya kritik masyarakat terhadap kejelasan penentuan calon penerima bantuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program BSPS di Desa Gunung Betuah dengan menggunakan teori Sutrisno (2010). Melalui teori ini, efektivitas program akan dianalisis berdasarkan beberapa aspek seperti pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan dan perubahan kondisi rumah setelah menerima bantuan.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial maupun kemanusiaan. Dalam prosesnya, pertanyaan penelitian biasanya tumbuh secara alami seiring perjalanan studi, sementara data dikumpulkan langsung dari lingkungan tempat partisipan berada. Analisis dilakukan dengan cara menelusuri detail-detail kecil untuk kemudian dirangkai menjadi tema-tema besar yang lebih menyeluruh. Peneliti tidak hanya mencatat data, tetapi juga berupaya menafsirkan makna di baliknya. Karena itu, laporan penelitian kualitatif tidak kaku, melainkan fleksibel, memberi ruang bagi kekayaan cerita, keragaman makna, serta kompleksitas realitas yang ditemukan.

Pendekatan deskriptif diterapkan guna menyajikan penjelasan yang detail dan terstruktur mengenai kondisi rumah sebelum dan sesudah adanya program. Menurut Samsu (2017), penelitian deskriptif merupakan sebuah pendekatan yang memberikan gambaran yang mendalam terhadap objek atau subjek yang diteliti selaras dengan kenyataannya. Penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memaparkan fakta apa adanya.

Dengan menggabungkan metode kualitatif dan deskriptif, memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih dalam melalui interaksi langsung dengan narasumber. Hal ini menjadi penting karena penerima program BSPS memiliki pengalaman yang beragam terkait pelaksanaan bantuan. Penelitian kuantitatif

hanya mampu mengukur *output*, tetapi tidak dapat menggali makna yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, metode kualitatif deskriptif dipandang lebih relevan dan sesuai digunakan untuk menilai efektivitas sebuah program berbasis masyarakat sehingga akan memperkaya analisis terkait sejauh mana program BSPS berhasil meningkatkan kualitas rumah.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan guna memperjelas batasan studi kualitatif dan menyaring data agar peneliti dapat memisahkan informasi yang sesuai dengan yang tidak sesuai. Sehingga penelitian ini dapat menjawab tujuan secara terarah dan mendalam. Untuk itu, fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Fokus pertama yaitu menilai efektivitas program BPS di Desa Gunung Betuah selama periode 2022-2024 yang ditinjau dari teori pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno (2010), suatu program dikatakan efektif jika telah memenuhi beberapa aspek berikut :

- a. Pemahaman Program

Menurut Sutrisno (2010) pemahaman program mengacu pada kemampuan pelaksana dan penerima bantuan dalam memahami arah, tujuan, serta aturan yang ada dalam sebuah program. Dalam konteks BPS, pemahaman program mencakup pengetahuan aparatur desa, pendamping dan penerima bantuan terhadap maksud, tujuan, serta teknis pelaksanaan program BPS. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Permen PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, pendamping bertugas untuk memberdayakan calon penerima bantuan melalui kegiatan sosialisasi. Melalui kegiatan tersebut, calon penerima bantuan memperoleh pemahaman mengenai tujuan program, besaran bantuan, kewajiban swadaya serta teknis pelaksanaan program.

b. Ketepatan Sasaran

Menurut Sutrisno (2010) ketepatan sasaran adalah tingkat kesesuaian target program dengan realisasinya di lapangan. Dalam konteks BSPS, ketepatan sasaran menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan di Desa Gunung Betuah. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permen PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, penerima BSPS merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan seperti memiliki rumah tidak layak huni, berpenghasilan tidak melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP), dan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah. Penyelenggara wajib melakukan verifikasi agar bantuan tidak salah sasaran, sedangkan penerima harus memenuhi seluruh persyaratan agar program berjalan sesuai tujuan sosial yang diharapkan.

c. Ketepatan Waktu

Menurut Sutrisno (2010) ketepatan waktu adalah keselarasan pelaksanaan program dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya, karena pelaksanaan yang tepat waktu berpengaruh terhadap hasil program. Dalam konteks BSPS, ketepatan waktu ditinjau dari kesesuaian proses pelaksanaan program dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 12 Permen PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang mengatur tahapan penyelenggaraan BSPS mencakup pendataan, pencairan, pemanfaatan bantuan dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu akan mendukung kelancaran pembangunan.

d. Perubahan Nyata

Menurut Sutrisno (2010) perubahan nyata adalah dampak yang dirasakan oleh pihak yang menerima program, jika terdapat perubahan kearah yang lebih baik maka program dapat dikatakan berhasil. Dalam konteks BSPS, perubahan nyata dilihat dari kondisi rumah masyarakat penerima bantuan

di Desa Gunung Betuah, sebelum dan setelah menerima bantuan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Permen PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perubahan tersebut meliputi peningkatan struktur bangunan, kualitas bahan atap, dinding, lantai, pencahayaan, sirkulasi udara, serta ketersediaan sarana sanitasi. Perubahan fisik yang tampak secara langsung menjadi bukti keberhasilan BSPS dalam meningkatkan kualitas rumah.

e. Pencapaian Tujuan

Menurut Sutrisno (2010) pencapaian tujuan adalah kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan tujuan yang telah ditetapkan serta manfaat yang diterima oleh sasaran program. Dalam konteks BSPS, pencapaian tujuan dilihat dari keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan di Desa Gunung Betuah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permen PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, program BPSB bertujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi tiga aspek utama, yaitu keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas bangunan. Capaian ini menjadi ukuran keberhasilan program dalam memberikan manfaat nyata bagi penerima melalui peningkatan kualitas rumah.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Desa Gunung Betuah dipilih karena termasuk salah satu desa yang menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan jumlah penerima yang tinggi dibandingkan desa lain di kecamatan yang sama. Berdasarkan data penerima BSPS di Kecamatan Abung Barat, desa ini berada pada kelompok desa dengan tingkat alokasi bantuan tertinggi, sehingga mencerminkan masih besarnya kebutuhan

perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan. Kondisi tersebut menjadikan Desa Gunung Betuah sebagai lokasi yang relevan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program BSPS, khususnya dari aspek pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan program dalam meningkatkan kualitas hunian, serta perubahan nyata yang dirasakan oleh penerima bantuan.

3.4 Jenis dan Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui sumber pertama atau dari penelitiannya secara langsung, data ini biasanya dikumpulkan secara langsung oleh peneliti lewat wawancara dan observasi (Sugiyono, 2017). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan. Data ini dianggap penting karena mencerminkan pengalaman nyata dan persepsi langsung penerima bantuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapatkan oleh peneliti melainkan melalui perantara, data ini bisa berbentuk dokumen ataupun studi kepustakaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain (Sugiyono, 2017). Data sekunder didapatkan melalui dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, dan arsip administrasi desa. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan pembanding untuk memvalidasi informasi dari responden. Selain itu, literatur ilmiah mengenai perumahan swadaya dan kebijakan perumahan juga digunakan sebagai rujukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dan narasumber secara langsung. Teknik ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pedoman untuk menggali pandangan dan pengalaman informan secara lebih mendalam. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami makna subjektif yang dimiliki responden terhadap fenomena yang diteliti (Rasyid, 2015).

Tabel 7. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Edi Erwanto	Masyarakat Penerima Bantuan
2.	Umar Baki	Masyarakat Penerima Bantuan
3.	Riana Sinta	Masyarakat Penerima Bantuan
4.	Saripudin	Kepala Urusan Perencanaan Desa Gunung Betuah
5.	Murni	Kepala Desa Gunung Betuah
6.	Ridho Al fashil	Koordinator Kabupaten Program BSPS Kabupaten Lampung Utara
7.	Zulman Haridan, S.T., M.P.W.K	PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung (Ditjen Perumahan Perdesaan)

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi juga berarti melihat dan memperhatikan dengan tujuan memahami hubungan antar aspek dalam fenomena yang diamati. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data empiris yang mencerminkan realitas sosial di lapangan (Rasyid, 2015). Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat hasil nyata program BSPS. Peneliti dapat mencatat perbedaan kondisi rumah sebelum dan sesudah menerima program, seperti struktur bangunan, sanitasi, atau fasilitas dasar lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian, seperti arsip, laporan, catatan, foto, atau dokumen resmi pemerintah. Teknik ini mencakup pencarian bukti yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk memperkuat analisis. Dokumentasi berfungsi mendukung hasil observasi dan wawancara melalui bukti yang dapat diverifikasi secara objektif (Rasyid, 2015).

Tabel 8. Daftar Dokumentasi

No	Nama Dokumen
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2.	Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
3.	Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
4.	Peraturan Bupati Lampung Utara No. 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lampung Utara.
5.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data tidak berhenti setelah data terkumpul, melainkan berlangsung sepanjang kegiatan penelitian. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017), memperkenalkan model analisis data yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. Reduksi data merupakan tahap awal yang bertujuan menyaring dan menyederhanakan informasi dari lapangan agar lebih fokus pada hal-hal yang relevan dengan penelitian. Reduksi data dalam penelitian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gunung Betuah dilakukan dengan menyaring seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar terfokus pada aspek-aspek utama penelitian. Data yang diperoleh dari aparat desa, pendamping program, dan penerima bantuan dikelompokkan ke dalam lima aspek, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan

waktu pelaksanaan, perubahan nyata kondisi rumah, serta pencapaian tujuan program. Proses reduksi data tidak hanya bertujuan menyederhanakan informasi, tetapi juga menelaah secara kritis keterkaitan antar-temuan pada masing-masing aspek. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan tanpa menghilangkan konteks empiris yang relevan. Melalui proses ini, data yang dianalisis menjadi lebih terarah dan mampu menggambarkan pelaksanaan BSPS secara utuh.

2. Penyajian data, pada tahap ini data yang telah terpilih kemudian ditampilkan dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian BSPS dilakukan dengan menyusun hasil reduksi data ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis berdasarkan aspek-aspek penelitian yang telah ditetapkan. Setiap aspek disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan tingkat pemahaman penerima bantuan terhadap program BSPS, ketepatan sasaran penerima, serta ketepatan waktu pelaksanaan program di lapangan. Penyajian data juga memuat gambaran perubahan nyata yang dialami penerima bantuan setelah program dilaksanakan, terutama pada kondisi fisik rumah. Selain itu, pencapaian tujuan program dijelaskan melalui keterkaitan antara hasil pembangunan rumah dan tujuan utama BSPS. Penyajian data yang terstruktur memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data lapangan.
3. Penarikan kesimpulan, tahap ini sejatinya tidak hanya terjadi di akhir penelitian, tetapi sudah berlangsung sejak proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir analisis. Peneliti menafsirkan makna dari setiap aspek dengan mengaitkannya pada fokus penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Program BSPS di Desa Gunung Betuah. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan kesesuaian dan konsistensi temuan dari berbagai sumber data, baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak didasarkan pada pandangan subjektif peneliti, melainkan pada data empiris yang telah dianalisis secara mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek utama agar hasil penelitian dianggap kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2017), terdapat empat kriteria yang umum digunakan, dalam penelitian kualitatif agar hasil penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keempat kriteria tersebut yaitu:

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di lapangan. Penelitian dilakukan secara cermat dan mendalam agar data yang diperoleh mampu menggambarkan efektivitas program sebagaimana dirasakan oleh penerima bantuan. Peneliti berupaya menyesuaikan setiap temuan dengan fakta empiris yang ditemui selama proses pengumpulan data. Untuk menjaga tingkat kepercayaan tersebut, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari penerima bantuan BSPS, aparatur desa, dan pendamping program. Perbandingan ini membantu peneliti memahami kesesuaian maupun perbedaan pandangan terkait pelaksanaan program.
- b. Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui cara ini, peneliti memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan BSPS di Desa Gunung Betuah, terkhusus pada aspek perubahan nyata. Temuan terkait aspek tersebut diperoleh dari penjelasan informan yang kemudian diperkuat melalui pengamatan langsung di lapangan serta dokumentasi foto sebagai pendukung data.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi, melainkan untuk

memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pelaksanaan BSPS di tingkat desa. Oleh karena itu, peneliti menyajikan uraian yang jelas mengenai kondisi lokasi penelitian, karakteristik penerima bantuan, serta proses pelaksanaan program. Dengan penjelasan tersebut, pembaca dapat menilai sendiri relevansi temuan penelitian ini bagi wilayah lain.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan menekankan pada konsistensi proses penelitian sejak awal hingga akhir. Untuk menjaganya, setiap tahapan penelitian dicatat dan disusun secara runtut, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis. Peneliti juga melakukan konsultasi secara berkala dengan dosen pembimbing guna memastikan bahwa proses dan hasil penelitian berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, alur penelitian dapat ditelusuri kembali dan dipertanggungjawabkan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian berkaitan dengan upaya menjaga objektivitas hasil penelitian. Peneliti memastikan bahwa setiap temuan yang disajikan bersumber dari data lapangan, bukan dari pandangan pribadi. Hal ini dilakukan dengan menyertakan kutipan wawancara, hasil observasi kondisi rumah penerima BSPS, serta dokumen pendukung sebagai dasar analisis. Proses penarikan kesimpulan juga dilakukan secara terbuka dan dikonsultasikan dengan pembimbing, sehingga temuan mengenai efektivitas Program BPS dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait efektivitas program BSPS terhadap peningkatan kualitas rumah penerima bantuan di desa gunung betuah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori Sutrisno (2010), dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gunung Betuah secara umum telah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan. Selama pelaksanaan program sebagian besar aspek telah terpenuhi, meskipun belum optimal pada satu aspek yaitu ketepatan waktu.
2. Aspek pemahaman program menunjukkan hasil yang baik, penerima bantuan dan pelaksana program telah memahami tujuan BSPS, bantuan yang bersifat stimulan, kewajiban swadaya, serta ketentuan teknis pembangunan melalui proses sosialisasi dan pendampingan oleh TFL dan aparat desa.
3. Aspek ketepatan sasaran telah sesuai dengan ketentuan program karena penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah tidak layak huni yang ditetapkan melalui proses verifikasi. Namun demikian, persyaratan kesiapan swadaya menyebabkan masih terdapat masyarakat yang secara kondisi ekonomi dan fisik rumah memenuhi kriteria tetapi belum dapat mengakses bantuan. Pada aspek ketepatan waktu, pelaksanaan belum berjalan secara optimal. Pada tahap pendataan dan pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu. Namun, pada tahap pencairan dan pemanfaatan bantuan mengalami keterlambatan, khususnya pada periode 2022–2023 yang dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi material, faktor cuaca, serta kondisi akses jalan desa yang belum memadai.

4. Aspek perubahan nyata dan pencapaian tujuan program menunjukkan hasil yang cukup baik. Tujuan program untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah telah tercapai melalui perbaikan struktur dan keselamatan bangunan. Selain itu, program juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif penerima bantuan dalam proses renovasi, meskipun aspek sanitasi pada periode 2022-2023 masih memerlukan penguatan agar tujuan program dapat tercapai dengan optimal.
5. Pelaksanaan program BSPS di Desa Gunung Betuah juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan keluarga, dukungan aparatur desa dan pendamping, serta kesediaan penerima bantuan untuk berswadaya. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan dana stimulan, keterlambatan distribusi material, dan kondisi akses jalan desa yang belum memadai, yang berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaan program.

5.2 Saran

a. Kementerian PKP dan Pemerintah Daerah

Kementerian PKP dan pemerintah daerah perlu merevisi ketentuan sosialisasi BSPS agar informasi tidak hanya diberikan kepada calon penerima, tetapi juga kepada masyarakat luas sehingga kriteria penetapan penerima, khususnya terkait kesiapan swadaya, dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, dalam menghadapi keterbatasan dana stimulan serta masih banyak masyarakat miskin dengan rumah tidak layak huni belum dapat menjangkau bantuan karena tidak mampu memenuhi kesiapan swadaya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kajian kembali dengan melibatkan akademisi, praktisi perumahan, dan perwakilan masyarakat untuk merumuskan skema yang lebih adil dan sesuai kondisi di lapangan. Skema tersebut dapat berupa penyesuaian besaran bantuan berdasarkan kemampuan ekonomi calon penerima bantuan serta pengurangan proporsi swadaya bagi masyarakat yang sangat miskin. Kekurangan pendanaan juga dapat diatasi melalui kerja sama antara Kementerian PKP dan Pemerintah Daerah, serta partisipasi sektor

swasta melalui program CSR untuk mendukung penyediaan material tambahan, terutama pada fasilitas sanitasi dan komponen rumah yang belum terpenuhi. Selain itu, efektivitas distribusi bahan bangunan perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan perencanaan yang lebih baik agar proses renovasi tidak mengalami keterlambatan.

b. Pemerintah Desa Gunung Betuah

Pemerintah Desa diharapkan meningkatkan pendataan rumah tidak layak huni secara lebih akurat dan berkala, serta memperkuat koordinasi dengan pendamping dan pihak penyedia material agar proses pelaksanaan program dapat berjalan lebih tepat waktu dan mengurangi hambatan teknis di lapangan. Selain itu, pemerintah desa juga harus melakukan perbaikan jalan untuk mempermudah akses distribusi material sehingga mencegah terjadinya keterlambatan material pada periode pelaksanaan BSPS selanjutnya.

c. Penerima Bantuan

Penerima bantuan diharapkan bersama pendamping memastikan bahwa dalam proses identifikasi kebutuhan, rencana perbaikan benar-benar mengacu pada ketentuan rumah layak huni yang telah ditetapkan. Perbaikan tidak hanya berorientasi pada tampilan luar yang terlihat lebih baik, tetapi harus mengutamakan kekokohan dan keselamatan bangunan, serta kesehatan penghuni khususnya melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang layak sebagai bagian penting dari hunian yang sehat. Selain itu, penerima BSPS diharapkan mempersiapkan swadaya dengan lebih matang, baik dalam bentuk tabungan maupun kontribusi tenaga kerja, serta menjaga komunikasi yang aktif dengan pendamping dan pemerintah desa agar pembangunan dapat berjalan lebih efisien.

d. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meninjau perubahan kondisi rumah dan kesejahteraan penerima dalam jangka waktu tertentu setelah bantuan diberikan. Pendalaman pada aspek partisipasi masyarakat di luar penerima bantuan juga dapat membantu memahami faktor sosial yang mendukung keberhasilan program. Melalui pengembangan tersebut, penelitian berikutnya diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Amara, M. T., Darmawan, & Suwanto. (2024). Analisis Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 4(4), 916–924.
- Arahap, F. A. (2021). Evaluasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesawaran. Skripsi: Universitas Lampung.
- Arikunto, Suharsimi & Jabar. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ashari, M. L., & Hariani, D. (2019). Analisis efektivitas program kartu tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 574-594.
- Aswanto, A., & Edward, Y. (2025). Analisis Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *ANALISIS*, 15(01), 98-116.
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Lampung Utara. DPR RI. Diakses pada 13 November 2025, <https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-60.pdf>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara. (2025). Kabupaten Lampung Utara dalam angka 2025. *BPS Kabupaten Lampung Utara*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara. (2025). Kecamatan Abung Barat dalam Angka 2025. *BPS Kabupaten Lampung Utara*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak menurut kabupaten/kota. Diakses pada 29 Agustus 2025, dari <https://lampung.bps.go.id/id/statistics->

<table/2/NzE2IzI=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-menurut-kabupaten-kota.html>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). Provinsi Lampung dalam angka 2025 (Lampung Province in Figures 2025, Vol. 56). *BPS-Statistics Lampung Province*.
- Bebhe, K., & Poerwanto, L. M. F. (2023). Konsep Self Help Housing Menggunakan Material Bata dengan Desain Parametrik. *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 5(01), 8-18.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.
- Campbell. (1989). *Riset Dalam Efektivitas Organisasi. Terjemahan Sahat Simamora*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110).
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy (14th ed.)*. Pearson Education.
- Efendi, Y. G. (2010). Efektivitas Iklan Televisi Indosat Im3 Online Saykoji Berdasarkan Direct Rating Method (DRM). *Jurnal UAJY*.
- Fitri, C. M. (2024.). Analisis Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (12), 2411-2421.
- Idris, F., Mukhrijal, M., & Rasanjani, S. (2023). Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(2).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022.
- Khairunisa, I., & Hayati, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(2), 1324-1435.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88-98.

- Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 1.
- Mutia, F. N. H., Setiawati, R. I. S., & Wahed, M. (2023). Peran Keswadayaan dalam Upaya Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 324-335.
- Nugroho, R. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Pamungkas, T. P., & Bawono, S. E. (2025). Konsep Rumah Sehat dalam Konteks Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *Jurnal Akkasia*, 1(01), 1-9.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. (2024). Sejarah Kabupaten Lampung Utara. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Diakses pada 13 November 2025, dari <https://lampungutarakab.go.id>
- Peraturan Bupati Lampung Utara No. 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lampung Utara.
- Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Peters, B. G. (2003). *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration*. Routledge.
- Rahmawati, A. G. (2024). Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Skripsi: Universitas Lampung.
- Rasyid, F. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Praktik*. Kediri: STAIN Kediri Press. ISBN 978-602-8167-61-1.
- Rasyidah, U. M. (2019). Diare sebagai konsekuensi buruknya sanitasi lingkungan. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 1(1), 31-36.
- Rita, W. Y. (2023). Strategi Komunikasi Selasar Sunaryo Dalam Memberikan Literasi Seni Pada Masyarakat Kota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Roman, E. (2022). Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur - Nusa Tenggara Timur. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2 (03), 98-111.

- Sabatier, P. A. (2007). *Theories of the Policy Process* (2nd ed.). Westview Press.
- Salan, P., Syukur, A., & Makleat, N. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui program kursus komputer dalam kerangka teori Jim Ife (studi kasus di pusat kegiatan belajar masyarakat Bintang Flobamora Kota Kupang). *Education For All*, 3(2), 10-20.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Pusaka.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Teraslampung.com. (2015). Kabag Hukum Pemkab: Hari lahir Lampung Utara berdasarkan ketetapan Residen Lampung pada 1946. Diakses pada 24 Desember 2025, dari <https://teraslampung.com/kabag-hukum-pemkab-hari-lahir-lampung-utara-berdasarkan-ketetapan-residen-lampung/>
- Tua, M. M. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Heawea, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Skripsi: Universitas Katolik Widya Mandira.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Widoyoko, E. P (2013). *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.